

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN AGAM

**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)

**PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG (PBG)
BIDANG CIPTA KARYA**

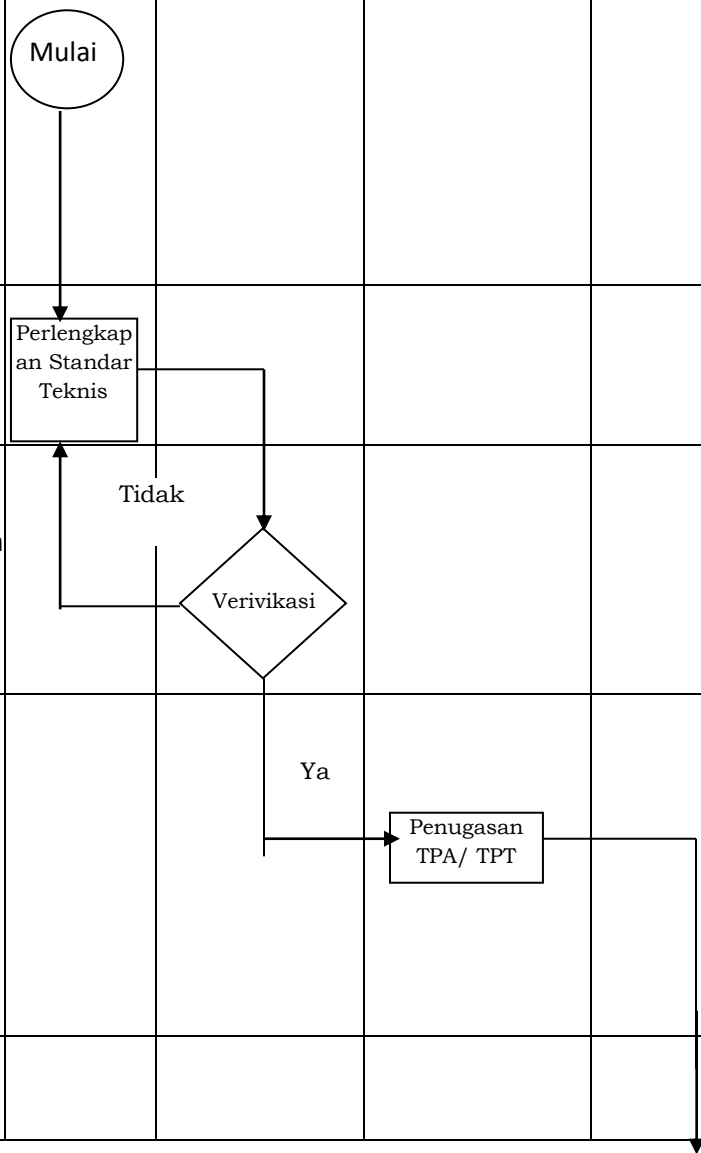
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**BIDANG CIPTA KARYA**

Nomor SOP	17
Tanggal Pembuatan	Desember 2021
Tanggal Revisi	Desember 2022
Tanggal Efektif	Januari 2023
Ditetapkan Oleh	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
Nama SOP	: Pelayanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);	<ol style="list-style-type: none">1. Administrator Sarjana/ Diploma/ SMU/SMK Sederajat2. Operator Sarjana/ Diploma/ SMU/SMK Sederajat3. Surveyor Sarjana/ Diploma/ SMU/SMK Sederajat4. Analis Data Diutamakan S1 Sipil, Arsitektur, Planologi, dan Lingkungan5. Memahami tentang Pelayanan Perizinan6. Memahami peraturan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Ruang7. Mampu mengoperasikan peralatan komputer

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560); 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82); 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 03); 16. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Garis Sempadan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2012 Nomor 126); 	
<p>Keterkaitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Perizinan (DPMPTSP Naker) 2. SOP Surat Masuk 	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan ruang 2. Komputer/ LCD/ Laptop/ Printer/ Scanner/ Alat Tulis Kantor/ dll 3. GPS, Meteran, dan Kamera, 4. Jaringan Internet

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Pemohon	Operator	Pengawas	TPA/TPT	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
.	Pendaftaran melalui SIMBG ; https://simbg.pu.go.id/ Petunjuk teknik permohonan dapat diunduh pada tautan Petunjuk Teknik Permohonan PBG/SLF dan SBKBG Untuk Pemohon pada halaman PENGUMUMAN website SIMBG.	Mulai						Tidak ada durasi waktu	- Akun Pemohon - Data Pemohon
2.	Upload Dokumen Permohonan PBG	Perengkapan Standar Teknis					- Dokumen Perencanaan Teknis PBG - Aplikasi Web SIMBG	Tidak ada durasi waktu	Dokumen Rencana Teknis dalam SIMBG
3.	Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemohon oleh Sekretariat. Dalam hal dokumen tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon						- Dokumen Perencanaan Teknis PBG - Aplikasi Web SIMBG	1 Hari Kerja	Checklist dan verifikasi kelengkapan Dokumen
4.	Penugasan TPA/ TPT dan Penjadwalan Konsultasi; 1. Penugasan TPA/ TPT oleh Sekretariat. 2. Sekretariat menentukan jadwal Konsultasi Dokumen.						- Surat Penugasan TPA/TPT dari Kepala Dinas Teknis - Aplikasi Web SIMBG - Undangan Konsultasi	1 Hari Kerja	- Penunjukan TPA/ TPT - Input Jadwal Konsultasi SIMBG
5.	Konsultasi Dokumen dengan TPA/ TPT;						- Dokumen Perencanaan Teknis	3-28 Hari Kerja	- Berita Acara Konsultasi TPA/



	TPA/TPT melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal, dan perpipaan. Dalam hal apabila dokumen tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon.						<ul style="list-style-type: none"> PBG – Aplikasi Web SIMBG – Jaringan Internet – Ruang Konsultasi 		<ul style="list-style-type: none"> TPT – Berita Acara Rapat Pleno TPA/ TPT
6.	Sekretariat mengunggah Berita Acara Pemeriksaan Terakhir dan Kesimpulan TPA/ TPT ke dalam SIMBG						<ul style="list-style-type: none"> – Berita Acara Konsultasi TPA/ TPT – Berita Acara Rapat Pleno TPA/ TPT – Aplikasi Web SIMBG 	1 Hari Kerja	Input Hasil Konsultasi
7.	Sekretariat melakukan Perhitungan teknis untuk Retribusi						<ul style="list-style-type: none"> – Perda Retribusi PBG – Aplikasi Web SIMBG 	1 Hari Kerja	Jumlah Retribusi
8.	Kepala Dinas Teknis melakukan pengesahan “ Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis ”						<ul style="list-style-type: none"> – Berita Acara Rapat Pleno TPA – Aplikasi Web SIMBG 	1 Hari Kerja	Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis
9.	Proses Penagihan Retribusi oleh Dinas Perizinan 1. Penyampaian Surat Ketetapan Retribusi Daerah) SKRD 2. Verifikasi Bukti Pembayaran Retribusi 3. Penyampaian Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 4. Persetujuan Penerbitan PBG 5. Penyerahan PBG						<ul style="list-style-type: none"> – SKRD – SSRD – STS 	1 Hari Kerja	SSRD
10.	Persetujuan Penerbitan PBG						<ul style="list-style-type: none"> – Aplikasi Web SIMBG 	1 Hari Kerja	– PBG

Hasil Konsultasi

Penetapan Retribusi

Validasi Kepala Dinas

Penerbitan PBG oleh DPMPSTP Naker

	oleh Dinas Perizinan								
11.	Penyerahan PBG oleh Dinas Perizinan		Selesai	←					<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen PBG - Lampiran Dokumen PBG

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Tata Ruang



OFRIZON, ST
Pembina Tk. I /IV.b
Nip. 196907271998031004